**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDEKS DESA MEMBANGUN**

**IMPLEMENTATION OF VILLAGE INDEX DEVELOPMENT POLICY**

Hidayat1a, Siti Sulastri2 Endah Christianingsih1

1 Sekolah Pascasarjana, Universitas Nurtanio Bandung

Campus II: Jl. Casa No. 2 Sulaiman Bandung 40229.

2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bandung

Jl. Raya Soreang Km. 17 Kec. Soreang Kab. Bandung

a Korespondensi: Hidayat, E-mail: hidayat.dr@unnur.ac.id

(Diterima: 15-02-2021; Ditelaah: 16-02-2021; Disetujui: 13-03-2021)

ABSTRACT

This study focuses on the Implementation of Village Index Development Policy by taking a case study in Kutawaringin District, Bandung Regency with a sub-focus of research, namely communication factors, resources, disposition and bureaucratic structure. With the aim of knowing and analyzing the Implementation of Village Index Development Policy. This research uses a qualitative research with a case study research method, with data analysis techniques that include data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the Implementation of Village Index Development Policy in Kutawaringin District, Bandung Regency was assessed based on factors that influenced the implementation of policies, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure were not optimal. Obstacles in the Implementation of Village Index Development Policy in Kutawaringin District, Bandung Regency is the socialization that is less thorough, less clear and less intensive. Human resources, especially at the village level, do not understand SOP. Many villages do not want to join the policy program. There are still village chiefs who do not want their villages to rise because of concerns about not getting village development funding, and the dominant authority of village chiefs in some villages is less support in policy implementation. Efforts made to overcome obstacles are managing by continuing to conduct effective communication between all levels of bureaucracy/implementor policies ranging from the Bandung Regency level to the village level in the Kutawaringin District. Socialization and coaching continues to be carried out to villages, especially six villages that are still in developing village status. Providing more intensive motivation to villages that are already in Advanced Village status in order to try to increase into Independent Villages

Keywords: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic.

ABSTRAK

Penelian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun mengambil studi kasus di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan sub fokus penelitian yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus, dengan teknik analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dinilai berdasarkan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi kurang optimal. Hambatan dalam implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung adalah sosialisasi yang kurang menyeluruh, kurang jelas dan kurang intensif. Sumberdaya manusia terutama pada tingkat desa yang kurang memahami SOP. Banyak desa yang tidak mau mengikuti program kebijakan tersebut. Masih ada Kepala Desa yang tidak mau desanya naik status dikarenakan kekhawatiran tidak mendapatkan bantuan dana pembangunan desa, dan masih dominannya kewenangan Kepala Desa di sebagian desa kurang memberikan dukungan dalam implementasi kebijakan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah mengelola dengan terus melakukan komunikasi efektif antar seluruh jajaran birokrasi/implementor kebijakan mulai tingkat Kabupaten Bandung sampai tingkat desa yang berada di wilayah Kecamatan Kutawaringin. Sosialisasi dan pembinaan terus dilakukan kepada desa-desa terutama enam desa yang masih berstatus Desa Berkembang. Memberikan motivasi lebih intensif lagi kepada Desa-Desa yang sudah berstatus Desa Maju agar berusaha meningkat menjadi Desa Mandiri.

Kata Kunci:Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

Hidayat., Siti Sulastri., & Endah Chiristianingsih. (2021). Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Sosial Humaniora, 12*(1), 20-32.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan sebuah kebijakan sebagai landasan hukum dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Desa. Sesuai Pasal 19 Undang-Undang tersebut dari 4 (empat) Kewenangan Desa, dua diantaranya adalah kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang menjadi kekuatan penting dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 telah meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri. Wardati, dkk. (2020) berpendapat bahwa Implementasi merupakan langkah sangat krusial dalam proses kebijakan. Maxmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah: pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting. Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Sebagai keputusan eksekutif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan diperlukan peraturan mengenai Indeks Desa Membangun yang meletakkan inisiatip dan kemampuan masyarakat sebagai dasar utama dalam proses pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Laksono dan Romlah (2019) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan dan proses pemberdayaan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan proses yang perlu dilalui adalah memberdayakan masyarakat sehingga terwujudlah sebuah keberdayaan masayarakat dalam pembangunan.

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa sesuai Pasal 19 (1) PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016, yaitu :

1. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada;
2. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada;
3. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya;
4. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya;
5. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama.

Beberapa indikasi permasalahan belum optimalnya Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1. Belum terlaksana secara optimal koordinasi antar Pemerintah daerah dan desa karena faktor komunikasi yang belum dilaksanakan dengan transmisi, kejelasan dan konsistensi.
2. Sumber daya belum sepenuhnya memadai, terutama sumber daya manusia di Kantor Desa yang belum mampu melakukan perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Basis data (*base line*) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa belum terlaksana secara optimal, terjadi dalam pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan belum sepenuhnya tepat memilih orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat sehingga data yang dihasilkan terkadang kurang relevan dengan kondisi terkini di Desa.

Berdasarkan indikasi permasalahan tersebut yang menjadi pertanyaan masalah (*problem questions*) adalah: “Bagaimana Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?” Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian awal dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berkenaan dengan topik Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun.

MATERI DAN METODE

Tempat pelaksanaan penelitian di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dimulai bulan November 2019 sampai dengan bulan Juli 2020. Penelian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan sub fokus penelitian sesuai pendapat George Edward III dalam Widodo (2010) yang meliputi 4 (empat) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Saefullah dalam Martoyo (2020) keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya, akan tetapi yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan penerimaan dengan kesadaran oleh lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Sugiyono (2012) mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan harapan dapat menjelaskan objek penelitian secara memadai. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 1) Sekretaris Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, 2) Tenaga Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 3) Kabupaten Bandung, 4) Pendamping Desa Teknik Informasi, 5) Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, 6) Kepala Desa di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, 7) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Sumber data penelitian ini diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Proses pengumpulan data menggunakan metode pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Moleong (2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dalam proses pengumpulan data yaitu menggunakan metode yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman (2009) meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan validitas dan reabilitas data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi. Sutopo (2006) menyatakan bahwa terdapat empat macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data/sumber (data triangulation), (2) triangulasi peneliti (investigator triangulation), (3) triangulasi metodologis (methodological triangulation), dan (4) triangulasi teoritis (theoritical triangulation).

HASIL DAN PEMBAHASAN

**Hasil**

Kecamatan Kutawaringin dengan lokasi yang berdekatan dengan Soreang (Ibu Kota Kabupaten Bandung) dan terkenal karena keberhasilan para pengusaha konveksinya yang bahkan mendapat julukan “Kampung Jin” di salah satu desanya (Mekarsari) dan keberadaan Stadion “Si Jalak Harupat” yang merupakan kebanggan warga Jawa Barat, merupakan salah satu simbol dan bukti kemajuan sosial-ekonomi kecamatan tersebut. Namun pada data update Skor Indeks Desa Membangun pada pertengan tahun 2020 menunjukan bahwa dari 11 (sebelas) Desa; 4 (empat) Desa berstatus sebagai Desa Maju dan 7 (tujuh) Desa masih berstatus sebagai Desa Berkembang, Berbanding jauh dengan Kecamatan Soreang yang terdiri dari 10 (sepuluh) Desa; dengan 6 (enam) Desa Mandiri dan 4 (empat) Desa Maju. Dalam mengkaji Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Peneliti menggunakan faktor implementasi kebijakan berdasarkan pendapat Edward III dalam Winarno (2012) yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dengan hasil sebagai berikut:

Komunikasi

Kriteria komunikasi dalam implementasi kebijakan yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi yang sesuai dengan pendapat Edward III dalam Subarsono (2011) bahwa dimensi komunikasi meliputi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistenc*y). Efektivitas implementasi kebijakan akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Dalam komunikasi pelaksanaan kebijakan publik, para penentu kebijakan dan seluruh tim yang dilibatkan harus dapat memenuhi kriteria: transmisi; yang menjadi acuan bahwa komunikasi tersampaikan menyeluruh ke seluruh pihak terkait dan masyarakat luas, yang menyangkut kejelasan (*clarity*), maksud, tujuan, sasaran, substansi dari kebijakan publik harus tersampaikan dengan sejelas-jelasnya, dan konsistensi, agar komunikasi yang terjalin terus dijaga dengan baik sehingga tujuan program dapat terlaksana sebagaimana harapan.

Pelaksanaan Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dari sisi komunikasi sudah berjalan dengan cukup baik, sesuai dengan hasil wawancara dengan para informan sebagai berikut :

Bimbingan, pendampingan, panduan-panduan tentang Kebijakan Indeks Desa Membangun sudah komplit. Penyebaran informasi lumayan gencar di lakukan ke sebelas desa di wilayah Kecamatan Kutawaringin. Sudah merata, jelas dan terus konsisten mendorong pelaksaannya ke tiap desa.

Hambatannya salah satunya kesalahan persepsi, menganggap dengan semakin tingginya status IDM, dikhawatirkan pihak desa akan berkurangnya bantuan pembangunan.

Semua pola komunikasi sudah berjalan secara baik, merata, jelas dan konsisten. Hanya yang terhambat di tingkat desa. Indeks Desa Membangun hanya diketahui sebagian perangkat saja, masyarakat banyak yang tidak paham.

Secara transmisi dan kejelasan, Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin sudah disampaikan cukup jelas. Hanya saja dari segi konsistensi masih belum sesuai jadwal.

Penyampaian informasi mengenai Kebijakan Indeks Desa Membangun masih belum merata ke semua lapisan masyarakat, hanya beberapa aparat desa saja yang relatif memahami. Soal kejelasan sebenarnya cukup jelas pentingnya program ini, hanya tata cara pelaksanaannya harus belajar lebih banyak lagi. Kadang tidak konsisten disaat banyak kesibukan lainnya yang harus dikerjakan.

Komunikasi Kebijakan Indeks Desa Membangun ini sudah berjalan dengan cukup baik, jelas dan konsisten.

Sosialisasi di tingkat desa masih cukup lemah, padahal level ini sasaran utama dan harus menjadi subjek penting pelaksaan IDM.

Pemahaman yang kurang karena inforamsi yang diteriman belum dapat dimengerti secara utuh, belum banyak masyarakat yang tahu, dan belum ada kekhususan yang terus-menerus menggarap program Indeks Desa Membangun.

Ada kekhawatiran kalau status desa naik, bantuan anggaran akan berkurang, karena anggaran itu kan dipriritaskan untuk desa-desa yang tertinggal dan sangat tertinggal.

Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat.

Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sebagai faktor pendukung yang sangat penting sumberdaya yang tersedia harus memadai dan mepunyai kompetensi yang sesuai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya anggaran yang memadai, sumberdaya perlengkapan, dan sumberdaya kewenangan yang sesuai dengan ruh dari program kebijakan.

Pelaksanaan Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dari sisi sumberdaya sudah berjalan dengan cukup baik,, sesuai dengan hasil wawancara dengan para informan sebagai berikut :

Tidak ada masalah dengan sumberdaya baik SDM, anggaran, peralatan dan masalah kewenangan. Program ini sudah dirancang sistematis dan sempurna. Tinggal melaksanakan saja dengan sebaik-baiknya.

Secara struktural SDM kita sudah lengkap, hambatannya SDM yang ada di level pelaksana desa dan para kepala desa yang bisa jadi beda pemahaman atau beda motivasi. Ini masalah mental.

Sumberdaya manusia dari sisi tenaga pendamping lapangan kalau mau lebih maksimal harus ditambah secara kuantitas dan kualitas, anggaran cukup tinggal pemanfaatnya saja yang lebih tepat sasaran. Kalau sumberdaya kewenangan dari tingkat pusat sampai kecamatan sudah baik, hanya di tingkat desa masih suka terjadi dominasi kewenangan oleh Kepala Desa.

Sumberdaya manusia dari unsur birokrasi sudah cukup lengkap, tetapi keterlibatan/partisipasi masyarakat masih belum banyak diberdayakan. Sumberdaya anggaran, sudah cukup banyak hanya saja masih belum sesuai kebutuhan. Sumber daya peralatan sudah mencukupi hanya saja masih ada yang kurang, sumberdaya kewenangan masih di atas kewenangan kepala desa belum mau mengikuti perkembangan.

Sumberdaya yang ada semuanya sudah memadai, tinggal sisi manusianya saja yang harus mempunyai kesadaran dan kemauan untuk berubah, untuk bersama-sama mensukseskan peningkatan status Indeks Desa Membangun Desa.

Mengenai semua unsur sumberdaya dalam program Indeks Desa Membangun sudah cukup terpenuhi.

Pemahaman SDM di desa belum optimal. Kewenangan penuh kepala desa yang menjadikan single decision yang sering salah kaprah dan menghambat.

Belum adanya rasa percaya diri dan kemauan dari desa untuk menjadi status desa maju ke mandiri. Tahun 2020 baru ada 4 Desa yang menjadi Desa Maju di Kecamatan Kutawaringin.

Kesadaran SDM yang relatif masih rendah. Dari tokoh masyarakat banyak juga tenaga-tenaga pendamping yang terlibat dalam pembangunan desa, selain orang lokal desa, ada juga yang dari luar desa. Jadi masyarakat setempat terasa kurang begitu dilibatkan.

Disposisi

Edward III dalam Widodo (2010) mengemukakan bahwa disposisi sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara benar sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi mengacu kepada pengukuran atas dua kriteria yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif yang diterima para pelaksana (implementors).

Dimensi disposisi pada pelaksanaan Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan hasil wawancara dengan para informan sebagai berikut :

Masalah disposisi tentu saja semuanya sudah lengkap sesuai aturan sesuai panduan IDM. Kalau tentang insentif apa yang sudah diatur oleh Kemendes PDT itu saya rasa sudah cukup. Kalau mau kaya ya jangan dari program IDM yang menuntut pengabdian tinggi.

Pengangkatan birokrasi yang dibutuhkan untuk pelaksaan Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin sudah cukup baik dan memadai. Kalau masalah insentif ini adalah hal yang relatif, meski tidak besar tapi disyukuri sajSecara birokrasi sudah baik, secara insentif belum sesuai. Masalah pengangkatan birokrasi dalam Kebijakan Indeks Desa Membangun sudah baik, sudah cukup lengkap. Soal insentifnya untuk para pelaku program kelihatannya masih kurang. Struktur birokrasi yang dilibatkan sudah lengkap, tidak ada masalah. Tugas mensukseskan pelaksaan IDM di Kecamatan Kutawaringin terhitung berat. Desa-desa yang ada sebagian besar masih berstatus Desa Berkembang dan sepertinya tidak mau berubah status. Belum adanya kemauan dari desa untuk berubah status menjadi Desa Mandiri. Insentif untuk pelaku kebijakan IDM hanya dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal saja untuk tenaga ahli. Ada beberapa desa yang berinisiatif membantu biaya operasional Tenaga Pendamping Desa. Ada sebagian masyarakat yang tidak tahu menahu soal ini.

Struktur Birokrasi

Pada dimensi struktur birokrasi, dimana impelemtator dari kebijakan publik adalah jajaran birokrasi yang harus mempunyai pengaruh yang signifikan dalam melaksanakan kebijakan publik dengan dukungan SOP yang lengkap dan jelas serta faktor pendukung lainnya sehingga terjalin kerjasama yang saling menguatkan, saling mendukung, dan saling melengkapi untuk satu tujuan bersama yaitu keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik yang dimaksud.

Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, dilihat dari dimensi struktur birokrasi yang diukur dari sub dimensi SOP dan Fragmentasi menyiratkan catatan yang cukup baik di sisi SOP dan Pragmentasi, sesuai dengan hasil wawancara dengan para informan sebagai berikut : SOP Kebijakan Indeks Desa Membangun sudah detail tahapan-tahapannya. Mengenai keterlibatan instansi terkait jangan dilihat sebagai keragaman instruksi apalagi intervensi. Semua membantu dan mendorong keberhasilan pelaksanaan kebjikan IDM. SOP yang ada sangat baik, tinggal melaksanakannya saja dengan penuh tanggung jawab. Fragmentasi yang terjadi dampaknya baik, karena saling melengkapi antar lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan IDM di Kecamatan Kutawaringin. Masih ada beberapa desa yang belum mau mengimplementasikan Kebijakan Indeks Desa Membangun. SOP sudah sangat jelas, hanya fragmentasinya yang suka membingungkan, karena tanggung jawab program IDM ini melibatkan banyak pihak/instansi terkait mulai tingkat Kementrian, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat Desa. Ujung tombaknya kan tetap di tingkat Desa. Di Desa kita masih belum benar-benar menguasai. Belum ada kemauan dari desa untuk meningkatkan status menjadi Desa Mandiri.

Keterampilan pelaksana di desa masih belum sesuai harapan. Ada kekhawatiran kalau status desa naik, bantuan anggaran akan berkurang, karena anggaran itu kan diprioritaskan untuk desa-desa yang tertinggal dan sangat tertinggal.

Pembahasan

Implentasi Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung

Komunikasi

Dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, dimensi komunikasi memegang peranan penting sebagai alat penyampaian pesan dari seluruh isi kebijakan. Cara paling populernya salah satunya berupa kegiatan sosialisasi. Pemerintah sebagai implementor dari kebijakan ini berfungsi secara strategis menyampaikan secara luas, jelas, dan konsiten segala hal yang berkenaan dengan kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM).

Dimensi komunikasi dalam penelitian ini ditentukan oleh indikator-indikator yaitu: transmisi, kejelasan dan konsistensi. Indikator transmisi yang mengharuskan agar kebijakan disampaikan kepada pelaksana kebijakan maupun juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator kejelasan yang mengharuskan agar kebijakan yang ditrasmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, dan substansi dari kebijakan tersebut. Indikator konsistensi yang diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam pelaksanaannya, indikator transmisi yang ukurannya seberapa luas penyeberan informasi kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin, sehingga poin-poin dalam kebijakan tersampaikan merata ke semua pihak yang terlibat, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, Pemerintah Kecamatan Kutawaringin dan sebelas desa yang berada di wilayah Kecamatan Kutawaringin yaitu : Buninagara, Cibodas, Cilame, Gajahmekar, Jatisari, Jelegong, Kopo, Kutawaringin, Padasuka, Pameuntasan, dan Sukamulya, masih belum begitu merata dan menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat yang seharusnya dapat berpartisipasi.

Pengakuan jajaran pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai desa yang menyatakan bahwa informasi/sosialisasi kebijakan Indeks Desa Membangun sudah dilakukan secara luas dan merata, kenyataannya bertolak belakang dengan keterangan yang diperoleh dari tokoh masyarakat yang menyatakan tidak banyak mengetahui tentang kebijakan Indeks Desa Membangun yang tengah berlangsung di desanya.

Pada indikator kejelasan dalam dimensi komunikasi, menyisakan bahan evaluasi bahwa sebagian besar pelaksana di tingkat desa kurang memahami secara detail kebijakan Indeks Desa Membangun. Hal itu peneliti amati ketika para operator desa yang bertugas membantu infut data IDM ke aplikasi online terlihat masih menerka-nerka.

Konsistensi yang merupakan indikator disiplin dalam melaksanakan kebijakan Indeks Desa Membangun bisa dikatakan belum terpenuhi secara baik. Jadwal-jadwal kegiatan sesuai tahapan pelaksanaan IDM masih banyak yang tidak sesuai. Alasan yang disampaikan salah satunya karena kesibukan atas beban kerja yang banyak Kepala Desa dan Perangkat Desa. Padahal ada Tenaga Pendaming Desa, Kecamatan yang terus melakukan pembinaan dan monitoring, dan ada tenaga Pendamping Lokal Desa yang fokus menangani pelaksanaan kebijakan ini.

Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya ditentukan oleh sumberdaya yang memadai. Sumberdaya tersebut dalam penelitian ini adalah sumberdaya manusia satu diantara dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, sumberdaya anggaran yang merupakan bahan bakar utama implementasi kebijakan, sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam implementasi kebijakan, dan sumberdaya kewenangan yang merupakan *power/*kekuatan birokrasi sebagai implementor kebijakan yang seharusmya mampu menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan.

Sumberdaya manusia yang dapat melaksanakan dengan baik sebuah kebijakan dipengaruhi faktor kualitas dan kuantitas. Dalam implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung sumberdaya manusia secara kuantitas dinilai masih kurang, pun dari sisi kualitas. Hal itu terlihat dari keluhan yang disampaikan Tenaga Ahli Kabupaten, Tenaga Pendamping Desa Kecamatan, dan Tenaga Pendamping Lokal Desa. Secara kualitas penguasaan teknologi informasi dan penguasaan materi IDM apalagi di tingkat desa masih belum mumpuni, kalau tidak boleh dikatakan belum sesuai dengan kebutuhan tuntutan kerja dalam melaksanakan kebijakan IDM.

Sumberdaya anggaran dalam implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin sudah cukup memadai, tetapi sebagain tenaga Pendamping Desa melihat bahwa penggunaannya kadang belum sesuai sehingga kurang tepat sasaran untuk menaikan tiga indeks IDM yaitu : indeks ekonomi, indeks sosial, dan indeks ekologi/lingkungan.

Dalam hal sumberdaya kewenangan, tampak mengemuka tentang kewenangan besar Kepala Desa yang mendominasi arah pelaksanaan kebijakan, sehingga tenaga Pendamping Desa di tingkat Kecamatan Kutawaringin mengeluhkan masih banyaknya desa yang tidak mau terlibat dalam pelaksaan kebijakan Indeks Desa Membangun, dengan alasan naif adalah ketakukan desanya tidak mendapat bantuan dana pembangunan ketika status desanya naik ke level yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung.

Disposisi

Edward III dalam Widodo (2010) mengungkapkan jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dimensi disposisi dalam hubungannya dengan pelaksaan kebijkan Indeks Desa Memabangun di Kecamatan Kutawaringin, belum dilaksanakan secara optimal terutama dalam pengangkatan birokrasi, yang terjadi dalam pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan belum sepenuhnya tepat memilih orang-orang yang memiliki dedikasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat sehingga data yang dihasilkan terkadang kurang relevan dengan kondisi terkini di Desa. Masalah yang terjadi nampak di Kecamatan Kutawaringin yang seharusnya paling tidak sejajar dengan Kecamatan Soreang yang desa-desanya didominasi dengan status Desa Mandiri, sementara di Kecamatan Kutawaringin, dari sebelas desa, tidak satupun yang berstatus Desa Mandiri, malahan didominasi status Desa Berkembang.

Masalah yang menjadi indikator pada dimensi disposisi selain pengangkatan birokrasi adalah insentif. Hal ini yang dikeluhkan oleh para tenaga Pendamping Desa, dimana mereka hanya menerima anggaran dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) saja, sementara beban operasional keseharian mereka cukup tinggi.

Dibalik masalah insentif untuk para pelaku, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi khusus untuk desa yang berhasil naik status menjadi Desa Mandiri, berupa Mobil Apresiasi Kampung Juara (Maskara). Mobil ala Transformer itu dapat dijadikan mobil serbaguna sesuai kebutuhan masyarakat atau kepentingan desa. Mobil ini telah dilengkapi alat pemadam kebakaran dan P3K (Ramdan, 2019).

Struktur Birokrasi

Dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, pengukuran dimensi struktur birokrasi dilihat dari dua indikator, yaitu SOP dan Fragmentasi. Edward III dalam Widodo (2010) mengemukakan bahwa struktur birokasi mencangkup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organnisasi dan sebagainya.

Berdasarkan indikator SOP, implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, hanya saja sebagian implementor terutama pada tingkat desa masih belum bisa melaksanakan SOP sebagaimana mestinya, salah satunya karena keterbatasan pemahaman dan adanya intervensi kewenangan dari Kepala Desa. Banyak Kepala Desa di Kecamatan Kutawaringin yang tidak menghendaki desanya naik status ke level yang lebih tinggi.

Dari sisi fragmentasi, bahu-membahunya DPMD Kabupaten Bandung dengan lembaga terkait lainnya termasuk jajaran pemerintahan Kecamatan Kutawaringin, Tenaga Ahli Kabupaten, Camat dan jajarannya, Tenaga Pendamping Desa Kecamatan, dan lainnya dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Ketika Kabupaten Bandung berhasil menjadi Kabupaten yang mendominasi perolehan terbanyak status Desa Mandiri, Kecamatan Kutawaringin yang notabene paling berdekatan dengan ibu kota Kabupaten, malah cukup jauh tertinggal dengan empat Desa Maju dan tujuh Desa Berkembang.

Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung*.* Kecamatan Kutawaringin selain Kecamatan Soreang yang diharapkan menjadi contoh keberhasilan implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bandung, ternyata masih jauh dari harapan. Hal itu terjadi karena beberapa faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapai pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi program, dalam hal ini adalah sosialisasi dari Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin tidak begitu merata tersampaikan kepada seluruh jajaran sebelas pemerintahan desa dan kepada seluruh lapisan masyarakat. Bahkan lebih banyak masyarakat yang sama sekali tidak tahu akan adanya Kebijakan Indeks Desa Membangun yang sedang berjalan. Unsur kejelasan dalam penyampaikan komunikasi/sosialisasi kebijakan juga masih menjadi kendala, karena detail dari panduan pelaksanaan kebijakan tidak dipahami secara utuh oleh implemenntator di tingkat desa.

Dari sisi sumberdaya, sumberdaya manusia dan sumberdaya kewenangan menjadi faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin ketika SDM yang terlibat belum dapat bekerja secara optimal, ditambah masalah kewenangan di tingkat desa yang bertumpu kepada sosok seorang kepala desa.

Pengangkatan birokrasi untuk kepentingan pelaksanaan Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum. Insentif yang disediadakan sepenuhnya ada dalam skema kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Yang menjadi hambatan adalah ketika biaya operasional sehari-hari tim pendamping desa dan para pelaku lainnya yang mengalami kekurangan karena tingginya tingkat mobilitas program.

Disposisi yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung sudah memenuhi persyaratan karena berisi tugas-tugas dan petunjuk-petunjuk yang lengkap dan jelas, hanya masalah insentif yang menorehkan catatan-catatan kekurang puasan implementor terutama para tenaga pendamping desa.

Masalah pemahaman SOP yang belum optimal di tingkat desa adalah salah satu hambatan yang berarti, fragmentasi kadang suka menjadi hambatan ketika tanggung jawab suatu kebijakan yang pada beberapa lembaga/badan yang berbeda namun tingkat koordinasi masih kurang terjalin dengan baik.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung*.* Para implementor Kebijakan Indeks Desa Membangun di tingkat Kabupaten Bandung dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, Tenaga Ahli Bidang Infrastruktur Desa, Tenaga Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi Desa, Tenaga Ahli Bidang Pelayanan Sosial Dasar, Tenaga Ahli Kabupaten Bandung Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan tingkat Kecamatan Kutawaringin, dalam hal ini Camat dan Pendamping Desa Kecamatan, telah berupaya teus menerus melaksanakan sosialisasi Kebijakan Indeks Desa Membangun kepada sebelas desa yang ada di wilayah Kecamatan Kutawaringin. Sosialisasi yang dilaksanakan terus menerus baik dalam acara formal berupa rapat-rapat dengan jajaran perangkat desa, maupun dengan cara non formal pada setiap pertemuan dengan Kepala Desa dan stafnya.

Pembinaan secara khusus berupa pelatihan-pelatihan pada SDM Desa yang terlibat dalam pengolahan dan infut data IDM terus dilakukan agar TIM IT Desa termasuk Kepala Desa memahami dan terampil cara mengakses dan memasukan data perkembangan desa pada aplikasi Indeks Desa Membangun. Dalam pelaksanaannya para Pendamping Lokal Desa bersama Kepala Desa yang melakukan infut data.

Pemberian insentif khusus dalam bentuk apresiasi dari Gubernur Jawa Barat pada tahun 2019 berupa Mobil Aspirasi Kampung Juara (MASKARA) kepada desa-desa yang sudah berhasil menyandang status Desa Mandiri, diharapkan dapat memacu motivasi desa-desa yang masih berstatus Desa Berkembang dan Desa Maju untuk berlomba-lomba menaikan status IDM desa masing-masing dengan target segera menjadi Desa Mandiri dengan klasifikasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui penilaian kualitas, akuntabilitas dan pelayanan publiknya baik, ekonominya maju, pelayanan publiknya tinggi, kualitas kepemimpinannya baik, dengan nilai rata-rata nilainya A.

Dalam mengatasi masalah pada pemahaman SOP dan penyebaran tanggung jawab pada pelaksanaan Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin, implementor tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa terus melakukan koordinasi secara intensif, salah-satunya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih instruksi dan kewenangan sehingga akan membingungkan pelaksana terutama yang berada di tingkat desa.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dinilai berdasarkan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi kurang optimal yang meliputi :

Komunikasi efektif berlangsung pada tingkat kabupaten sampai kecamatan, sedangkan pada tingkat desa dianggap kurang berhasil dan sosialisasi yang dilaksanakan tidak menyeluruh menyentuh semua lapisan masyarakat.

Sumberdaya manusia secara kuantitas dinilai masih kurang dan secara kualitas penguasaan teknologi informasi dan penguasaan materi IDM di tingkat desa masih belum sesuai dengan kebutuhan tuntutan kerja dalam melaksanakan kebijakan IDM.

Pengangkatan Tenaga Pendamping Lokal Desa masih relatif dipengaruhi unsur subjektif dari Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Pemahaman SOP pada sebagian besar implementor di tingkat desa masih kurang sehingga kurang mengusai materi IDM dalam hal pengolahan data dan input data pada aplikasi online Indeks Desa Membangun (IDM).

Hambatan dalam implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung adalah sosialisasi yang kurang menyeluruh, kurang jelas dan kurang intensif. Sumberdaya manusia terutama pada tingkat desa yang kurang memahami SOP. Banyak desa yang tidak mau mengikuti program kebijakan tersebut. Masih ada Kepala Desa yang tidak mau desanya naik status dikarenakan kekhawatiran tidak mendapatkan bantuan dana pembangunan desa, dan masih dominannya kewenangangan Kepala Desa di sebagian desa kurang memberikan dukungan dalam implementasi kebijakan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah mengelola dengan terus melakukan komunikasi efektif antar seluruh jajaran birokrasi/ implementor kebijakan mulai tingkat Kabupaten Bandung sampai tingkat desa yang berada di wilayah Kecamatan Kutawaringin. Sosialisasi dan pembinaan terus dilakukan kepada desa-desa terutama enam desa yang masih berstatus Desa Berkembang. Memberikan motivasi lebih intensif lagi kepada Desa-Desa yang sudah berstatus Desa Maju agar berusaha meningkat menjadi Desa Mandiri.

Saran

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya implementasi kebijakan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

Agar para implementator IDM tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa lebih meningkatkan efektivitas dan intensitas komunikasi, khususnya pada tingkat Desa untuk menghindari kesalah-pahaman pada pelaksanaan pengelolaan dan infut data IDM. Sosialisasi lebih ditingkaatkan serta menyeluruh menyentuh semua lapisan masyarakat.

Agar dilakukan peningkatan pemahaman dan keterampilan teknisnya dalam mengolah data secara benar sesuai kriteria data yang ditentukan dalam panduan Indeks Desa Membangun.

Agar pemilihan Tenaga Pendamping Lokal Desa benar-benar berorientasi kepada kualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan program IDM dan menanggalkan unsur subjektifitas dari Kepala Desa. Pada indikator insentif, agar pihak yang berwenang lebih memberikan perhatian khusus dengan meningkatkan nilai reward yang lebih sesuai dengan beban kerja para pelaksana kebijakan khususnya para tenaga pendamping Desa dan Kecamatan.

Agar pemahaman Standar Operasional Prosedur (SOP) IDM di tingkat desa lebih ditingkatkan dengan cara bimbingan dan pendampingan yang lebih intensif dari para Tenaga Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tenaga Ahli Tingkat Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta Bandung.

Laksono, Bayu Adi, dan Romlah, Nasyikhatur. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial dan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 14(1): 1-11.

Martoyo. 2020. Implementasi Kebijakan Analisis Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Miskin di Kota Pontianak. *Jurnal Sosial Humaniora,* 11(2): 114–120.

Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif.: Remaja Rosdakarya, Bandung.

Miles, dan Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. UI-Press. Jakarta,

Nugroho, Dwijowijoto, Ryant. 2008. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Ramdan (2019) Gubernur Jawa barat berikan mobil MASKARA Ke desa yang memiliki kriteria. Diakses, 20 Desember 2019 dari [https://zonabandung.com/ ragam/2130/gubernur-jawa-barat-berikan-mobil-maskara-ke-desa-yang-memiliki-kriteria.html](https://zonabandung.com/%20ragam/2130/gubernur-jawa-barat-berikan-mobil-maskara-ke-desa-yang-memiliki-kriteria.html)

Subarsono, AG. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta, Bandung.

Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. UNS, Surakarta.

Wardati, Zulmasyhur dan Susanti. 2020. Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat. *Jurnal Sosial Humaniora,* 11(2): 121–140.

Widodo, Joko. 2010 Analisis Kebijakan Publik. Bayumedia. Malang

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. CAPS. Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.